

BPJS KETENAGAKERJAAN PERLU INTENSIFKAN SOSIALISASI INPRES NOMOR 2 TAHUN 2021

Rabu, 26 Mei 2021 - Anita Widyaning Putri

KENDARI - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menegaskan BPJS Ketenagakerjaan perlu mengintensifkan sosialisasi dan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu, Hery menekankan agar BPJS Ketenagakerjaan lebih fokus pada rekrutmen kepesertaan dibanding pengembangan dana investasi.

"Dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 maka BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan sumber dana dari APBN/APBD. Sehingga perlu penganggaran untuk sosialisasi dan public education," ujar Hery pada Diskusi Terbatas bertema Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsos Ketenagakerjaan pada Selasa (25/5/2021), di Kendari.

Hery mengatakan sosialisasi dan public education dilakukan demi peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. "Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya fokus pada pengembangan dana untuk investasi, namun harus lebih fokus mengejar target kepesertaan dan pelayanan klaim," terangnya.

Dengan demikian, pihaknya mendorong upaya koordinasi dan kerja sama antara Ombudsman RI dengan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Minarni Lukman mengatakan pihaknya memang kurang dalam sosialisasi di masa Pandemi Covid 19 ini. "Namun untuk lingkup dengan pemerintah daerah, kami sudah melakukan koordinasi dan kerja sama. Hanya tinggal dua kabupaten yang belum kami kunjungi untuk beraudiensi," terangnya dalam kesempatan yang sama.

Minarni menambahkan, hasil tindak lanjut rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah masuknya kepesertaan dari non ASN dengan penganggaran di APBD Perubahan 2021 dari Pemprov Sultra.

Acara dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Mastri Susilo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sultra LM Ali Haswandy serta stakeholders Jamsostek Sultra. (awp)